

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Secara Gratis Tahun 2010-2013 Pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung adalah tidak efektif karena:

a. Pada tahap pengorganisasiaan

1. Struktur Birokrasi

Telah memiliki prosedur implementasi kebijakan, yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman di dalam Implementasi Kebijakan Penerbitan KTP/KK/Akta kelahiran secara gratis

2. Komunikasi

Prosedur kebijakan belum dapat dikomunikasikan secara baik, sehingga masyarakat pengguna hanya datang ke pihak Kelurahan saja ketika ingin melakukan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Dikarenakan tidak mengikuti prosedur yang ada maka masyarakat pengguna pun dikenakan sejumlah biaya di dalam penerbitan ini. Sehingga sasaran yang hendak dituju oleh pemerintah melalui kebijakan ini yaitu

dilakukannya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Secara Gratis belum dapat berjalan maksimal.

3. Sumber daya

Tidak dibentuk pelaksana khusus di dalam Implementasi Kebijakan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, hal ini dikarenakan di setiap tingkatan telah terbentuk bidang-bidang yang sesuai sebagai pelaksana kebijakan ini. Setiap pelaksana kebijakan baik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun di Kelurahan, telah memiliki bagian tugasnya masing-masing dan mereka juga mempunyai tugas pokok yang menjadi acuan dalam proses kerjanya.

4. Disposisi

Memiliki standar pelayanan minimal yang digunakan dalam mengukur sikap atau perspektif yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan

b. Pada tahap interpretasi

1. Struktur Birokrasi

Merupakan kebijakan yang lahir dari kesadaran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung peraturan nasional yang telah ada yaitu Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Sehingga kebijakan ini merupakan kepanjangan

tangan dari aplikasi kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2. Komunikasi

Telah terjadi proses komunikasi yang baik dan berkelanjutan diantara para pelaksana Kebijakan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Secara Gratis di dalam menginformasikan mengenai isi kebijakan maupun mekanisme pelaksanaan kebijakan

3. Sumber Daya

Pelaksana Kebijakan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Secara Gratis telah memiliki petunjuk pelaksanaan yang diketahui jelas oleh pelaksana. Pelaksana kebijakan mulai dari Disdukcapil sampai dengan Kelurahan sudah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai isi kebijakan, sehingga Kebijakan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Secara Gratis dapat diinterpretasikan di dalam pelaksanaannya.

4. Disposisi

Pelaksana Kebijakan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Secara Gratis belum dapat bersikap sesuai dengan standar perilaku seharusnya sebagaimana yang terdapat dalam peraturan yang berlaku di dalam memberikan pelayanan

c. Pada tahap aplikasi

1. Struktur Birokrasi

Terjadi ketidaksesuaian antara pelaksana kebijakan seharusnya menurut Surat Edaran Wali Kota Bandar Lampung Nomor: 470/1852/IV.29/2013 dengan pelaksana yang berperan senyatanya di lapangan.

2. Komunikasi

Terjadi *gap* antara upaya sosialisasi yang dilakukan implementator dengan pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan kebijakan ini

3. Sumber daya

Kelurahan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertindak sebagai implementator dan Kecamatan kurang memiliki peran di dalam kebijakan ini.

4. Disposisi

Masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai didalam implementasi, menjadikan kebijakan ini berjalan tidak seimbang. Sikap atau perspektif pelaksana yang berbeda dengan pembuat kebijakan membuat proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Tujuan kebijakan ini tidak tercapai diantaranya memberikan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Secara Gratis kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung. Hal ini disebabkan masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan ini dan sikap aparatur yang masih dominan dalam mencari keuntungan pribadi di dalam Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

- e. Rencana Pelaksanaan Kebijakan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Secara Gratis tidak tercapai dimana pelaksanaan kebijakan ini berjalan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian lapangan, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka beberapa saran yang diajukan adalah

- a. Saran Teoritik

Terjadi perbedaan tingkat keefektifan hasil penelitian tentang kebijakan publik administrasi kependudukan yang didapat di Kecamatan dan Kota membuat pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan evaluasi guna mencari kekurangan-kekurangan di dalam implementasi kebijakan ini.

- b. Saran Praktis

Perlu dilakukan perbaikan terhadap sikap pemerintah baik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung maupun Kelurahan sebagai pelaksana Kebijakan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Secara Gratis yang masih dominan melakukan pungutan liar kepada masyarakat diantaranya dengan melakukan evaluasi dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaksana yang melakukan pungli. Serta pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Kebijakan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Keluarga dan Akta Kelahiran Secara Gratis kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi.